

**Analisis APBD untuk Menilai Kinerja Keuangan
Daerah Kota Pontianak Tahun 2018-2022**

TUGAS AKHIR



PUTRI AYU SHARINI

B1031211088

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TAHUN 2024**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Nama : Putri Ayu Sharini
NIM : B1031211088
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : S1 Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Proposal/Skripsi : Analisis APBD untuk Menilai Kinerja Keuangan
Dacrah Kota Pontianak Tahun 2018-2022.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Skripsi dengan judul tersebut di atas.

Dengan pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 04 Desember 2024



Putri Ayu Sharini

NIM. B1031211088

PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Ayu Sharini
NIM : B1031211088
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : SI Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Proposal/Skripsi : Analisis APBD untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2018-2022.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber data dan informasi baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 04 Desember 2024



Putri Ayu Sharini

NIM. B1031211088

LEMBAR YURIDIS

ANALISIS APBD UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2018-2022

Penanggung Jawab Yuridis

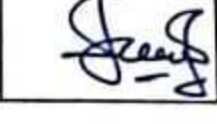


PUTRI AYU SHARINI

B1031211063

Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tgl Ujian Skripsi dan Komprehensif : 23 Desember 2024

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
1.	Ketua Penguji	Rusliyawati, S.E., M.Si., Ak.	15 / 01 / 2025	
		NIP. 197901272002122002		
2.	Sekretaris Penguji	Rudy Kurniawan, S.E., M.Sc., Ak.	06 / 01 / 2025	
		NIP. 196808211997021003		
3.	Penguji 1	Nina Febriana Dosinta, S.E., M.Si	06 / 01 / 2025	
		NIP. 198002272006042001		
4.	Penguji 2	Umiaty Hamzani, S.E., M.Com, Ph.D.	13 / 01 / 2025	
		NIP. 198012182003122001		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif

24 JAN 2025



Koordinator Program Studi Akuntansi

Dr. Kristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA

NIP. 197906182002122003

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT atas semua berkat, Rahmat dan Hidayahnyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Analisis APBD untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2018-2022 .”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan tanpa adanya bantuan dan dorongan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua tercinta dan terkasih, Bapak Amiruddin dan Ibu Sahara Husin yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberikan pendidikan hingga pada jenjang saat ini, yang tidak pernah bosan mendoakan, menyemangati dan memotivasi serta bantuan moril maupun materil, dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan kepada saya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tugas akhir ini. Khususnya kepada :

1. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Nella Yantiana, S.E., M.M., Ak., CA., CPA., CMA selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Dr. Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Rusliyawati, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, waktu, saran, pendapat dan dorongan sehingga tugas akhir ini terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Rudy Kurniawan, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Nina Febriana Dosinta, S.E., M.Si selaku Dosen Penguji satu yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan tugas akhir ini.
7. Ibu Umiaty Hamzani, S.E., M.Com selaku Dosen Penguji dua yang memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen (Khususnya dosen Jurusan Akuntansi) yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuannya selama masa perkuliahan.
9. Para staf Akademik, staf Tata Usaha, dan staf Perpustakaan serta semua pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan sampai penulisan skripsi ini selesai.
10. Sahabat, Gandhes Tri Candy yang telah memberikan bantuan, semangat, doa dan motivasi selama perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis hanya manusia biasa yang masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kekurangan dalam penelitian ini peneliti memohon maaf dan terima kasih atas kritik, saran dan masukan yang telah diberikan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Pontianak, 04 Desember 2024

Putri Ayu Sharini

NIM. B1031211088

**Analisis APBD untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Pontianak
Tahun 2018-2022**

Oleh:

Putri Ayu Sharini

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah guna mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Pontianak ditinjau dari rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio derajat desentralisasi, dan rasio keserasian. Pendekatan yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan kejadian-kejadian atau ciri-ciri yang terjadi selama penelitian dalam jangka waktu tertentu untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio kemandirian masih rendah dan masih mengandalkan transfer pendapatan dari pusat, rasio efektivitas efektif, rasio efisiensi kurang efisien, rasio derajat desentralisasi cukup, dan rasio keserasian belanja daerah mengalokasikan alokasi dana yang cukup besar untuk belanja operasional dibandingkan belanja modal.

Kata Kunci: APBD, Analisis Rasio Keuangan Daerah

Analisis APBD untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2018-2022.

RINGKASAN

1. Latar Belakang dan Tujuan Penelitian

Menurut DPR, APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan yang bertujuan untuk mendistribusikan dana, menjamin stabilitas, dan mengalokasikan dana. Undang-Undang 28 Tahun 2002 menetapkan APBN sebagai salah satu cara pengelolaan keuangan negara yang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat harus dilaksanakan secara beretika dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ketika daerah mempunyai otonomi, maka daerah juga bertanggung jawab mengatur dan mengatur kegiatan pemerintahan serta kepentingan daerahnya sendiri.

Untuk mengelola APBD secara terbuka dan efisien, pemerintah daerah harus menetapkan sistem otonomi keuangan sebagai bagian dari program Otonomi Daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD mengkaji dan menyetujui APBD setiap tahun, yang merupakan penjabaran tahunan pendapatan, belanja, dan tujuan keuangan daerah untuk periode yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Setiap tahun anggaran, seluruh pendapatan dan belanja daerah baik dalam bentuk moneter, barang, dan jasa harus dianggarkan menggunakan APBD.(Haryanto, 2007). APBD mendorong pengelolaan keuangan daerah, memberdayakan pemerintah daerah untuk mengawasi pembangunan melalui langkah-langkah desentralisasi.

APBD berfungsi sebagai mekanisme pemberian pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah Kota Pontianak merupakan salah satu wilayah yang mempraktikkan otonomi daerah. Dengan kata lain, wilayah Kota Pontianak telah mengelola dan memanfaatkan

sumber daya yang dimilikinya, dan diharapkan sanggup memberikan jasa yang terbaik kepada rakyat sekaligus membuka peluang bagi perekonomian wilayah Kota Pontianak untuk tumbuh dan berkembang.

Awani dan Hariani (2021) melihat pengaruh rasio keuangan dan kemandirian terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah. Dalam studi mereka pada tahun 2020, R. Baso dkk. mengevaluasi kinerja keuangan Kabupaten Bulukumba menggunakan Analisis Rasio Keuangan Daerah. Selanjutnya APBD dan kinerja pemerintah Kabupaten Batubara tahun 2015 hingga 2021 diteliti oleh Kania dan Pratiwi (2023). Temuan menunjukkan sejumlah kelemahan, termasuk variasi penurunan akibat capaian kinerja realisasi PAD dan Transfer yang tidak konsisten. Hasil penelitian juga menyoroti ketergantungan yang tinggi pada bantuan pemerintah pusat, menunjukkan bahwa kemandirian daerah masih relatif rendah.

Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan di Kota Pontianak mengandalkan data yang dikumpulkan Badan Pendapatan dan Aset Daerah ketika mengambil keputusan di tingkat daerah. Pengembangan kebijakan fiskal dan evaluasi efektivitas proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak sangat bergantung pada analisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Pola yang muncul dapat diketahui dengan membandingkan kinerja keuangan saat ini dengan periode sebelumnya. Untuk lebih memahami penggunaan keuangan publik pemerintah secara ekonomis, efisien, dan efektif, penelitian ini berupaya mengevaluasi kinerja keuangan Kota Pontianak dengan menggunakan data keuangan yang tersedia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kejadian-kejadian selama periode penelitian tertentu dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2008; Melina, 2021). Pendekatan ini akan dibatasi oleh data yang terdapat dalam Laporan Realisasi

Anggaran, yang dikumpulkan untuk memberikan gambaran yang cukup untuk dianalisis.

Peneliti mengumpulkan data/dokumen arsip (library Research). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder, seperti literatur yang terdapat di perpustakaan, laporan penelitian terdahulu, dan Laporan Realisasi APBD Kota Pontianak Tahun 2018–2022 yang dikumpulkan dari Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak (BKD). Semua analisis dan kesimpulan penelitian bergantung pada data ini. Penelitian ini bermaksud untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dengan membandingkan data pada tahun-tahun tersebut. Salah satu cara untuk menjelaskannya adalah ini:

1. Menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menilai tingkat ketergantungan dana pemerintah daerah atau provinsi. Daerah dengan rasio kemandirian lebih besar akan memerlukan bantuan dari pemerintah daerah dan provinsi yang lebih kecil, namun daerah dengan rasio kemandirian lebih rendah harus lebih bergantung pada bantuan tersebut.

Pemerintah daerah masih belum mampu mendanai proyek pembangunan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Hal ini mencerminkan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah, terbukti dengan pengetahuan masyarakat mengenai pajak serta retribusi (Awani dan Hariani, 2021).

2. Menghitung Rasio Efektivitas PAD

Rasio ini membandingkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya. Artinya rasio ini merupakan hasil dari perbandingan realisasi pendapatan dengan tujuan pendapatan yang telah ditetapkan. Kapasitas daerah dikatakan efektif jika rasio yang ditetapkan minimal 1 atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD maka semakin besar pula kapasitas daerahnya.

3. Menghitung Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi dilakukan untuk membandingkan rasio efektivitas dalam memberikan penilaian yang lebih akurat. Rasio efisiensi membandingkan realisasi pengeluaran dengan realisasi pendapatan daerah. Jika rasionya kurang dari satu atau kurang dari 100%, maka dapat dikatakan kinerja pemerintah daerah dianggap efektif. Kinerja pemerintah dikatakan baik jika rasio efisiensinya rendah.

4. Menghitung Rasio Derajat Desentralisasi

Tujuan analisis derajat desentralisasi adalah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan desentralisasi, mengetahui sejauh mana otonomi daerah dalam mengelola kepentingan pemerintahan daerah, dan menjadi landasan perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif. Mahmudi (2010) dalam Purba et al., (2022) menjelaskan bahwa tingkat desentralisasi dapat dinilai dengan membandingkan tingkat PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Rasio ini dapat menunjukkan sejauh mana pemda memaksimalkan sumber daya keuangan daerah dengan meningkatkan PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan. Semakin besar kontribusi terhadap PAD maka semakin besar pula kemampuan Pemerintah Daerah dalam melakukan desentralisasi.

5. Menghitung Rasio Aktivitas atau Keserasian Belanja Daerah

Rasio keserasian mengatur bagaimana pemerintah daerah membagi sumber daya keuangannya antara biaya operasional dan pembangunan. Halim (2012) berpendapat bahwa semakin banyak uang yang dialokasikan untuk belanja rutin, maka semakin kecil proporsi belanja investasi yang ditujukan untuk infrastruktur perekonomian masyarakat. Rasio keserasian dibagi menjadi dua perhitungan yaitu rasio belanja operasional dan rasio belanja modal.

Rasio belanja operasional dihitung dengan metode perbandingan total belanja operasional dengan total belanja daerah, yang memberikan informasi tentang proporsi belanja daerah dengan berkomitmen terhadap belanja operasional. Dengan kata lain, rasio ini mewakili jumlah pengeluaran pemerintah daerah untuk operasional dalam satu tahun anggaran.

3. Hasil Penelitian

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Daerah Kota Pontianak dari sisi Kemandirian Keuangan Daerah

Jika dilihat dari perbandingan proporsi keuangan daerah Kota Pontianak tahun anggaran 2018-2022, proporsi kebebasan moneter daerah tercatat sebesar 38,03% pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 39,37% pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 dan 2021, angkanya berkurang secara terpisah. Menjadi 37,94% dan 37,90% masing-masing karena dampak pandemi virus Corona yang dimulai pada awal tahun 2020. Kondisi ini menyebabkan penurunan rasio kemandirian keuangan daerah Pontianak. Pada tahun 2022, rasio tersebut kembali naik menjadi 46,38%. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa derajat kemandirian Kota Pontianak tergolong rendah atau berada dalam interval rasio 25%-50%, dengan persentase rata-rata 39,92%.

2. Kinerja Keuangan Daerah Kota Pontianak dari sisi Efektivitas PAD

Hasil perhitungan pada tabel menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak berhasil memungut pajak dan retribusi daerah dengan cukup efektif. Pencapaian tahun 2018 adalah 98,13%, meningkat menjadi 101,04% pada 2019. Namun, terdapat penurunan menjadi 94,52% pada 2020 dan 92,50% pada 2021 akibat pandemi Covid-19. Meskipun ada penurunan, persentase tersebut masih menunjukkan bahwa Kota Pontianak mampu mempertahankan efisiensi dalam pengumpulan pajak dan retribusi daerah. Secara keseluruhan, efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Pemerintah Kota Pontianak dari tahun 2018 hingga 2022 adalah 96,21%.

3. Kinerja Keuangan Daerah Kota Pontianak dari sisi Efisiensi PAD

Berdasarkan perhitungan, rasio efisiensi sebesar 96,44% pada tahun 2018, namun turun menjadi 91,60% pada tahun 2019. akibat Covid-19 rasio efisiensi mengalami lonjakan yang signifikan pada tahun 2020 dan 2021, yang berarti kinerja pemerintah mengalami penurunan. Namun pada tahun 2022 turun menjadi 97,86% yang menandakan kinerja pemerintah semakin

membaik. Proporsi kecakapan Pemerintah Daerah Pontianak tahun anggaran 2018-2022 dinilai kurang efisien dengan tingkat pencapaian rata-rata sebesar 99,66%. Hal ini menunjukkan bahwa presentasi otoritas publik dalam mengumpulkan dana kurang efektif, terlihat dari pola proporsinya yang di bawah 100 persen. Artinya, pemerintah daerah perlu mengeluarkan biaya besar untuk mencapai pelaksanaan yang optimal.

4. Kinerja Keuangan Daerah Kota Pontianak dari sisi Derajat Desentralisasi

Berdasarkan perhitungan di atas, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah Kota Pontianak pada tahun 2018 hingga 2022 digolongkan dengan kategori cukup. Rasio persentase yang dicapai setiap tahun antara tahun 2018 hingga 2022 kurang dari 50%. Rata-rata derajat desentralisasi Kota Pontianak pada tahun 2018 hingga 2022 adalah sebesar 26,45% yang tergolong cukup karena kurang dari 50%. Menunjukkan bahwa kegagalan Pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah telah membatasi kapasitas pemerintah daerah untuk menerapkan desentralisasi sendiri.

5. Kinerja Keuangan Daerah Kota Pontianak di lihat dari sisi Keserasian Belanja Daerah

Perhitungan rasio belanja rutin Kota Pontianak menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun, dengan angka persentase sebesar 70,04% pada tahun 2018, 72,88% pada tahun 2019, 72,92% pada tahun 2020, dan 73,38% pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022, turun 0,76% menjadi 72,62%. Ratarata rasio belanja rutin Kota Pontianak memenuhi standar kualifikasi, yaitu sebesar 72,37% dengan kriteria cukup.

Dari analisis terhadap rasio belanja modal Kota Pontianak selama periode 2018-2022, terlihat adanya penurunan signifikan. Pada tahun 2018, tercatat penurunan sebesar 28,78%, dan pada tahun 2019 menurun lagi menjadi 24,54%. Tahun 2021, tercatat penurunan yang lebih kecil sebesar 2,28%, menjadikan total rasio belanja modal sebesar 21,27%. Namun, pada tahun 2022, ada peningkatan rasio ke angka 25,05%. Secara keseluruhan, rata-rata

rasio belanja modal selama periode tersebut adalah 24,64%, yang dianggap masih memenuhi kriteria cukup.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dana yang dikelola oleh pemerintah daerah masih terfokus pada belanja rutin. Kondisi ini menyebabkan rasio belanja modal menjadi lebih rendah bila dibandingkan dengan rasio belanja rutin. Pemerintah Kota Pontianak tampaknya memberikan prioritas pada belanja rutin, sehingga anggaran untuk belanja modal bagi Kota Pontianak menjadi relatif kecil.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan Kota Pontianak selama tahun 2018-2020, diperoleh beberapa temuan berikut: Rasio Kemandirian: Selama periode 2018–2022, rata-rata persentase kemandirian Kota Pontianak dalam hal kebutuhan keuangan untuk pembangunan, pelayanan masyarakat, dan administrasi pemerintahan adalah sebesar 39,92%, masih di bawah kriteria 75%. Hal ini menunjukkan Kota Pontianak masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Rasio Efektivitas: Hasil rata-rata periode 2018–2022 adalah sebesar 96,21% yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak berhasil mencapai jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan. Rasio Efisiensi : Efisiensi Kota Pontianak selama ini berada di atas nilai efisiensi optimal sebesar 60%, meskipun termasuk dalam kategori kurang efisien dengan rata-rata pencapaian sebesar 99,66%. Rasio Desentralisasi: Selama kurun waktu 2018–2022, rata-rata persentase rasio desentralisasi Kota Pontianak adalah sebesar 26,45%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai operasionalnya masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan terbatasnya kapasitas pelaksanaan desentralisasi yang otonom. Rasio Keserasian Belanja Daerah: Kota Pontianak mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk operasional dibandingkan untuk modal. Jika rata-rata rasio belanja modal hanya sebesar 24,64%, rata-rata rasio belanja operasional mencapai 72,37%. Hasil ini memberikan gambaran umum bahwa Kota Pontianak perlu meningkatkan kemandirian keuangannya, memperbaiki

efisiensinya, dan mengoptimalkan penggunaan dana untuk tujuan pembangunan serta operasi. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan keuangan kota dapat lebih mandiri dan berkelanjutan.

Covid-19 telah mengubah perekonomian global, nasional, dan regional. Pandemi ini memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian Kota Pontianak, membatasi pergerakan masyarakat, aktivitas, serta produk dan jasa. Selain itu, konsumsi, investasi, transportasi, pariwisata, dan manufaktur semuanya menurun drastis sehingga berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Namun, pemerintah daerah dengan cepat menerapkan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat perekonomian daerah dengan meningkatkan pengeluaran, menjaga daya beli masyarakat, dan memungkinkan ekspor dan impor. Hal ini terkait dengan kinerja Pemerintah Kota Pontianak pascapandemi Covid-19 yang semakin membaik; Pemerintah Kota Pontianak perlu terus meningkatkan kinerja untuk menjaga tingkat efektivitas tinggi yang dapat berkontribusi pada peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Di samping itu, fokus pada APBD dan menetapkan skala prioritas adalah langkah penting untuk meningkatkan efisiensi keuangan daerah.

5. Saran

1. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan agar Kota Pontianak dapat lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dengan menghentikan operasional belanja dan mencari cara untuk mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
3. Pemerintah Kota Pontianak harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap strategi pengumpulan PAD, termasuk meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak dan retribusi. Penggunaan informasi teknologi, seperti aplikasi pembayaran pajak online, dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
4. Pemerintah perlu meninjau kembali alokasi anggaran antara belanja operasional dan modal belanja. Penetapan prioritas anggaran yang lebih

baik akan membantu memastikan bahwa investasi dalam infrastruktur dan pembangunan tidak terabaikan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR YURIDIS	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK	vii
RINGKASAN	viii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Kontribusi Penelitian.....	3
1.5 Gambaran Konseptual Penelitian.....	4
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Landasan Teori.....	5
2.2 Kajian Empiris	9
2.3 Kerangka Konseptual	17
BAB III.....	18
METODOLOGI PENELITIAN	18
3.1 Bentuk Penelitian	18
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	18
3.3 Data	18
3.4 Metode Analisis	18
BAB IV	20
HASIL DAN PEMBAHASAN	20
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	20
4.2 Hasil	21

4.3	Pembahasan.....	23
BAB V		27
PENUTUP		27
5.1	Kesimpulan	27
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	27
5.3	Saran.....	28
DAFTAR PUSTAKA		29
LAMPIRAN		31

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rasio Kemandirian dan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah.....	6
Tabel 2. 2 Tingkat Efektivitas dan Kriteria Efektivitas	7
Tabel 2. 3 Tingkat Efesiensi dan Kriteria Efesiensi.....	7
Tabel 2. 4 Tingkat Desentralisasi dan Kriteria Desentralisasi	8
Tabel 2. 5 Tingkat Belanja Operasi dan Kriteria Belanja Operasi.....	9
Tabel 2. 6 Tingkat Belanja Modal dan Kriteria Belanja Modal.....	9
Tabel 2. 7 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 4. 1 Hasil Perhitungan	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	17
---	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2018-2022.	31
Lampiran 2 Bukti Upload Jurnal	41
Lampiran 3 Hasil Uji Plagiasi	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut DPR, APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan yang bertujuan untuk mendistribusikan dana, menjamin stabilitas, dan mengalokasikan dana. Undang-Undang 28 Tahun 2002 menetapkan APBN sebagai salah satu cara pengelolaan keuangan negara yang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat harus dilaksanakan secara beretika dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ketika daerah mempunyai otonomi, maka daerah juga bertanggung jawab mengatur dan mengatur kegiatan pemerintahan serta kepentingan daerahnya sendiri.

Untuk mengelola APBD secara terbuka dan efisien, pemerintah daerah harus menetapkan sistem otonomi keuangan sebagai bagian dari program Otonomi Daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD mengkaji dan menyetujui APBD setiap tahun, yang merupakan penjabaran tahunan pendapatan, belanja, dan tujuan keuangan daerah untuk periode yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Setiap tahun anggaran, seluruh pendapatan dan belanja daerah baik dalam bentuk moneter, barang, dan jasa harus dianggarkan menggunakan APBD.(Haryanto, 2007). APBD mendorong pengelolaan keuangan daerah, memberdayakan pemerintah daerah untuk mengawasi pembangunan melalui langkah-langkah desentralisasi.

APBD berfungsi sebagai mekanisme pemberian pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah Kota Pontianak merupakan salah satu wilayah yang mempraktikkan otonomi daerah. Dengan kata lain, wilayah Kota Pontianak telah mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, dan diharapkan sanggup

memberikan jasa yang terbaik kepada rakyat sekaligus membuka peluang bagi perekonomian wilayah Kota Pontianak untuk tumbuh dan berkembang.

Awani dan Hariani (2021) melihat pengaruh rasio keuangan dan kemandirian terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah. Dalam studi mereka pada tahun 2020, R. Baso dkk. mengevaluasi kinerja keuangan Kabupaten Bulukumba menggunakan Analisis Rasio Keuangan Daerah. Selanjutnya APBD dan kinerja pemerintah Kabupaten Batubara tahun 2015 hingga 2021 diteliti oleh Kania dan Pratiwi (2023). Temuan menunjukkan sejumlah kelemahan, termasuk variasi penurunan akibat capaian kinerja realisasi PAD dan Transfer yang tidak konsisten. Hasil penelitian juga menyoroti ketergantungan yang tinggi pada bantuan pemerintah pusat, menunjukkan bahwa kemandirian daerah masih relatif rendah.

Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan di Kota Pontianak mengandalkan data yang dikumpulkan Badan Pendapatan dan Aset Daerah ketika mengambil keputusan di tingkat daerah. Pengembangan kebijakan fiskal dan evaluasi efektivitas proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak sangat bergantung pada analisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Pola yang muncul dapat diketahui dengan membandingkan kinerja keuangan saat ini dengan periode sebelumnya. Untuk lebih memahami penggunaan keuangan publik pemerintah secara ekonomis, efisien, dan efektif, penelitian ini berupaya mengevaluasi kinerja keuangan Kota Pontianak dengan menggunakan data keuangan yang tersedia.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, analisis rasio keuangan daerah dapat menjadi alat ukur dalam kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang dapat diukur dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Derajat Desentralisasi, dan Rasio Aktivitas atau Keserasian Belanja Daerah. Selain itu, dari hasil analisis rasio keuangan daerah dapat

melihat apakah ada perbandingan kinerja keuangan saat ini dengan periode sebelumnya dengan cara membandingkan hasil perhitungan kinerja periode 2018-2022.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Pontianak berdasarkan perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Derajat Desentralisasi, dan Rasio Aktivitas atau Keserasian Belanja Daerah?
2. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Kota Pontianak pada periode anggaran 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Pontianak berdasarkan perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Derajat Desentralisasi, dan Rasio Aktivitas atau Keserasian Belanja Daerah.
2. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Kota Pontianak pada periode anggaran 2018-2022.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi teoritis kepada pihak yang membutuhkan informasi kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Pontianak berdasarkan perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Derajat Desentralisasi, dan Rasio Aktivitas atau Keserasian Belanja Daerah.

1.4.2 Kontribusi Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat memberikan evaluasi atas kinerja keuangan Pemerintah Kota Pontianak selama periode 2018-2022 serta diharapkan mampu meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah dan dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah agar efektivitas dan efisiensi.

2. Bagi Akademis

Diharapkan dapat menambah literatur dan dapat menjadi sarana pengembangan serta referensi tentang analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai alat ukur untuk menilai kinerja keuangan daerah.

3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat memberikan transparansi kepada masyarakat mengenai pengelolaan anggaran daerah, serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang analisis rasio keuangan daerah.

1.5 Gambaran Konseptual Penelitian

Pada penelitian ini objek yang diteliti adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Pontianak berdasarkan perhitungan rasio untuk mengukur kinerja Pemerintah Kota Pontianak tahun 2018-2022 dan mencari perbandingan kinerja keuangan periode anggaran 2018-2022. Dari hal tersebut peneliti dapat menilai apakah kinerja Pemerintah Kota Pontianak dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Pontianak dan dapat dijadikan evaluasi dengan membandingkan kinerja keuangan saat ini dengan periode sebelumnya dengan cara membandingkan hasil perhitungan kinerja periode 2018-2022.